

## Bab IV

### Kontroversi Kebijakan Nuklir Iran

Kebijakan Iran soal nuklir mengubah posisi Iran dalam pergaulan internasional. Negara-negara di dunia akan mempertimbangkan soal hubungannya dengan Iran karena dianggap akan berpengaruh pada hubungan mereka dengan AS. Dari kebijakan ini akhirnya lahir dua kubu antara yang mendukung atau pun menentang. Negara pendukung sebagian besar adalah yang berasal dari Eropa Barat atau pun mereka yang memiliki ikatan kerjasama kuat dengan AS seperti Korea Selatan maupun Jepang.

Sedangkan negara pendukung, umumnya adalah negara yang memiliki akar budaya sama dengan Iran. Seperti Indonesia yang memiliki kesamaan dalam hal budaya Islam. Namun bisa juga negara yang memiliki tujuan yang sama seperti Venezuela dan Kuba. Kedua negara ini memang sudah sejak lama bertekad melawan dominasi AS di dunia.

Bila dijabarkan, pihak yang mendukung dan menentang memiliki pertimbangan masing-masing. Penjelasan di bawah ini bisa menggambarkan sedikit soal pertimbangan tersebut.

#### 4.1. Negara Pendukung Iran

Rusia dan Cina memiliki beberapa pertimbangan yang membuat mereka mendukung Iran. Namun untuk Rusia salah satu pertimbangan yang mendasarinya adalah soal ekonomi[62]. Rusia dan Iran berhasil menggeser posisi Arab Saudi sebagai negara penghasil minyak dunia. Kedua negara yang selama ini berseberangan pandangan dengan Arab Saudi dan AS tiba-tiba memegang kendali dunia melalui harga minyak yang fluktuatif. Bila keadaan ini tidak dicegah, maka besar kemungkinan Arab Saudi akan kehilangan *bargaining position* di mata dunia. Iran dengan nuklirnya akan mampu mengejar cepat ketertinggalan teknologi serta bisa menggantikan posisi Saudi sebagai kapitalis utama di Timur Tengah. Arab Saudi sudah pernah mencoba Rusia dengan menawarkan kontrak senjata. Pertemuan bilateral kedua negara (Saudi Arabia – Rusia) dihadiri oleh Pangeran Bandar bin Sultan dengan presiden Rusia Dmitry Medvedev dan Perdana Menteri Vladimir Putin. Tawaran senjata di utarakan oleh Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Pangeran Saud Al-Faisal. Bahkan tawaran itu sudah disampaikan langsung oleh Raja Abdullah ketika beliau berkunjung ke Moskow bulan Februari 2008. Raja Abdullah menganjurkan pada Rusia agar mengurangi kerjasama dengan Iran secara bertahap.

Untuk imbal baliknya, Arab Saudi berjanji memberikan kontrak-kontrak menarik untuk menjadi mitra Arab Saudi di Timur Tengah. Arab Saudi juga tertarik membeli sistem pertahanan udara, beberapa helikopter, dan Tank dari Rusia. Menlu Arab Saudi, Bandar bin Sultan sekaligus mantan duta besar yang berpengaruh di Amerika Serikat mengutarakan keinginan kerjasama itu sekali lagi pada pertemuan pekan ini (16 Juli 2008). Terlihat jelas kalau AS dan Arab Saudi sangat was-was dengan ambisi Iran dalam mengembangkan pengayaan uranium[63].

Ini merupakan usaha kali kesekian setelah delapan tahun sebelumnya AS gagal ‘merayu’ Rusia. Saat itu, para ahli di AS menyarankan Rusia untuk menandatangani perjanjian yang isi intinya sebagai berikut[64]:

1. Rusia akan melarang segala bentuk kerjasama dengan Iran terutama dalam distribusi *light water reactor* atau bahan bakar apapun yang bisa menghidupkan reaktor di Bushers. Termasuk memberi pelatihan bagi para operator nuklir.
2. Rusia tidak boleh menolong Iran dalam bentuk apapun untuk menyediakan teknologi dan komponen untuk memenuhi siklus nuklir Iran. Termasuk produksi heavy water, teknologi, penelitian reaktor, konversi uranium, pengayaan dan proses.
3. Demi keamanan nuklir, segala bahan bakar reaktor Bushehr yang disuplai oleh Rusia akan dikembalikan ke Rusia dan tak perlu disimpan di Iran. Bila ingin melengkapi siklus nuklir, Iran harus membuat permohonan pada pihak Rusia. Rusia juga punya hak menghancurkan teknologi nuklir Iran, yang sudah atau sedang dibangun.
4. Rusia akan meminta Teheran mematuhi Protokol IAEA sehingga badan ini memiliki akses pada data yang nuklir Iran.

Usaha ini bisa dipahami bila kita melihatnya dari sudut pandang ekonomi-teknologi. Basis utama kompetisi Arab Saudi di dunia adalah prinsip ekonomi yang sangat kuat mengakar, menggunakan segala kelebihan minyak dan gas untuk kemudian menghasilkan pemasukan besar untuk perekonomian negara. Pada akhir tahun 1985, Arab Saudi sudah menjadi produsen petrokimia berskala dunia dengan tawaran harga kompetitif. Lokasi geografis Arab Saudi membuat ia mampu meng-kapitalisasi negara disekitar Mediterania, Utara Afrika, Sub-kontinen India, Timur Jauh, dan yang paling penting; Amerika Serikat. Karena fokus utamanya adalah proses awal petrokimia, produk-produk Saudi bisa dibawa ke AS dengan tarif yang menguntungkan secara ekonomi. Ini artinya juga akan meningkatkan daya saing industri Amerika di pangsa pasar dunia, menaikkan penjualan untuk bisnis, dan akhirnya mengurangi pengangguran bagi rakyat AS. Simbiosis ini bisa digunakan Arab Saudi untuk mendapatkan keuntungan teknologi dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dari AS untuk kemudian digunakan untuk pengembangan revolusi industri[65].

Rusia dan Cina juga rajin menentang usulan AS soal sanksi PBB terhadap Iran. Penolakan kedua negara ini bisa dimaklumi mengingat rekam jejak sejarah keduanya dengan AS. Tahun 1992, Rusia dan Cina mendeklarasikan kerjasama ‘yang membangun’ di antara keduanya. Hal ini makin menguat empat tahun kemudian dengan pernyataan kerjasama yang disebut ‘rekanan strategis.’ Tahun 2001, Rusia-Cina malah menandatangani ‘persahabatan dan kerjasama’, sebuah sebutan yang seringkali diasumsikan sebagai tindakan oposisi menentang dominasi AS di dunia. Kendati sempat memberikan dukungan pada AS soal perang terhadap terorisme, keduanya tetap mengambil jarak dari negara adikuasa itu[66].

Kembali ke masalah nuklir, penolakan keduanya soal sanksi Iran membuat Dewan Keamanan haruslah mengambil jalan tengah. Resolusi DK-PBB mempunyai sifat mengikat, tetapi dengan tidak

tercapainya konsensus di antara anggota tetap, maka Dewan Keamanan telah dianggap gagal untuk mengeluarkan resolusi tersebut. Sebagai penggantinya, Dewan Keamanan mengeluarkan pernyataan dengan suara bulat yang meminta Iran untuk menunda program pengayaan uraniumnya selama tiga puluh hari hingga tanggal 5 April 2006.

Selain itu, Iran juga diminta untuk kembali bekerjasama dengan IAEA. Terhadap krisis ini, Iran sebenarnya telah menginginkan untuk melanjutkan perundingan mengenai konflik program nuklir tersebut, akan tetapi dengan syarat tanpa adanya pra-kondisi tertentu. Seiring dengan berjalannya waktu, pada awal bulan Juli 2006, kekuatan negara-negara barat dan Amerika kembali memutuskan untuk menggiatkan usaha-usaha untuk menghukum Iran melalui berbagai kemungkinan sanksi DK-PBB, kecuali Iran mau menghentikan program pengayaan uranium dan program nuklirnya hingga tanggal 12 Juli 2006. Negara-negara tersebut menawarkan paket bantuan kepada Teheran berupa teknologi maju dan termasuk dengan reaktor penelitian nuklir. DK akhirnya kembali mengeluarkan resolusi bertanggal 31 Juli 2006 yang memberikan jangka waktu satu bulan kepada Iran untuk memberhentikan pengayaannya atau siap untuk menerima resiko penjatuhan sanksi.

Berbagai negara, terutama Rusia, Cina, dan Afrika Selatan, tidak setuju dengan metode yang diinginkan oleh Amerika Serikat untuk menyelesaikan krisis Iran. Dalam hal ini, India adalah satu di antara banyak negara yang berhasil ditekan oleh Amerika sehingga memberikan suara untuk resolusi tersebut. Pertemuan IAEA mengenai isu Iran yang seyogyanya diselenggarakan pada tanggal 3 Februari 2006 ditunda hingga hari berikutnya. Ketika pada hari tersebut, yaitu 4 Februari 2006, IAEA memutuskan untuk menyerahkan Krisis Nuklir Iran kepada Dewan Keamanan. Dua puluh tujuh negara, memberikan suaranya terhadap resolusi yang pada intinya menyatakan untuk menyerahkan isu Iran kepada Dewan Keamanan.

Tiga negara, yaitu Kuba, Syiria, dan Venezuela, memberikan suara untuk menolak resolusi tersebut. Sedangkan Indonesia, Algeria, Belarus, Libya dan Afrika Selatan memberikan suara abstain. Setelah keluarnya keputusan tersebut, Iran tetap bertahan pada pendiriannya dan menyatakan bahwa mereka tidak akan berkompromi terhadap program pengayaan uraniumnya dengan Amerika ataupun negara-negara barat lainnya. Pernyataan ini kemudian diulangi kembali oleh Presiden Iran pada tanggal 10 April 2006.

Ahmadinejad juga mulai mencari sekutu dari beberapa negara Amerika Latin. Kunjungan empat hari Ahmadinejad pada 13 Januari 2007 ke Caracas, Venezuela, dikabarkan untuk mencari sokongan secara politik dan ekonomi. Ahmadinejad bahkan memanggil Presiden Venezuela, Hugo Chavez, sebagai 'saudara laki-laki'. Sebagai balasan, Chavez membela Iran dalam hal pembangunan fasilitas nuklir. Kedua negara itu malah balik menuduh kalau AS sengaja menggunakan isu nuklir sebagai usaha menumbangkan kekuasaan Ahmadinejad semata<sup>[67]</sup>.

Venezuela berani berdiri di sisi Ahmadinejad karena sadar ada kepentingan sumber daya minyak.

Dan kebetulan keduanya memiliki cadangan minyak berlimpah pula. Meski negaranya bukan termasuk negara maju, Venezuela termasuk segelintir negara yang menuai keuntungan karena melonjaknya harga minyak. Tambahan lagi, Presiden Venezuela, Hugo Chavez, dengan jelas menyatakan ketidaksukaannya pada Bush.

Ahmadinejad bisa membuat Indonesia bergabung dalam negara yang mendukungnya dengan tindakan lobi yang cukup kuat. Ahmadinejad mampu melancarkan komunikasi langsung dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika datang berkunjung ke Indonesia pada 8-13 Mei 2009. Dalam kasus nuklir ini, posisi Indonesia untuk mendukung sebenarnya juga dalam keadaan dilema. Hal ini disebabkan tingkat ketergantungan Indonesia terhadap Barat masih tinggi. Namun di satu sisi lain, Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk muslim.

Posisi dilematis ini membuat Indonesia mendukung Iran dengan syarat, yaitu hanya demi kepentingan teknologi dan sumber energi alternatif. Indonesia tidak akan mendukung bila teknologi itu dikembangkan menjadi bom nuklir. Dukungan ini dipenuhi dengan syarat untuk mencegah agar Barat tidak terbagi dalam aliansi-aliansi. Sebaliknya, jika Indonesia menolak tindakan Iran maka hal itu bisa menurunkan dukungan masyarakat kepada Pemerintah. Tambahan alasan lagi adalah soal dasar strategis menolak mendukung Iran sama dengan menyulitkan Indonesia dalam mendapat dana segar. Pasalnya Iran sudah menjanjikan akan memberi investasi sebesar US\$ 600 juta untuk pembangunan sektor dalam negeri[68].

Alasan ini cukup beralasan mengingat kebutuhan harian BBM domestik Indonesia masih defisit 300 ribu barel per hari. Selama ini defisit ini masih ditutupi lewat impor BBM. Dalam periode 2000-2004, LP3ES memprediksi biaya kerugian akibat selisih nilai ekspor impor itu mencapai Rp 12,2 triliun[69].

#### **4.2 Negara Penentang Iran**

Seperti dijabarkan dalam penulisan skripsi ini, dari awal Amerika Serikat adalah negara penentang utama soal kebijakan nuklir Iran. AS semakin rajin membawa masalah nuklir Iran ke meja Dewan Keamanan PBB setelah ancaman sanksi dari IAEA dianggap sudah tidak mempan lagi. Pada 24 September 2005, IAEA mengeluarkan resolusi bahwa masalah Iran akan dipercayakan kepada Dewan Keamanan. Resolusi ini dikeluarkan dan disetujui melalui 22 suara, sedangkan suara tidak setuju hanyalah satu suara dan sisanya sebanyak 12 negara memberikan suara abstain. Keluarnya resolusi ini ternyata juga telah menjadi saksi mata adanya pembagian antara negara-negara berkembang dan negara-negara maju.

Kecaman yang disponsori oleh Amerika Serikat dan EU-3 (Inggris, Jerman dan Perancis) cenderung menerapkan politik standar ganda dan sikap diskriminatif kepada Iran. Iran mempertanyakan keabsahan Israel, Pakistan dan India sebagai negara pemilik senjata nuklir yang tentunya atas 'restu' pemerintah Amerika Serikat. Padahal mereka bukanlah negara penandatangan dan peratifikasi NPT. Sedangkan Iran justru lebih berhak untuk mengembangkan energi nuklir untuk tujuan damai karena

Iran merupakan salah satu negara anggota NPT. Mengingat kembali bahwa sebelum Revolusi Islam Iran tahun 1979 terjadi, program pengembangan nuklir Iran sudah berjalan semenjak era tahun 1950-an[70].

Dalam beberapa buku yang pro pemerintahan AS, kebijakan nuklir Iran bahkan dianggap sebagai bentuk ‘paranoid’ –ketakutan berlebihan. Buku yang berisi artikel Anoushiravan Ehteshami itu mengungkapkan kalau Iran bahkan sengaja menggunakan momen pertikaian nuklir ini untuk menjalin kerjasama dengan Rusia dan Cina. ‘Paranoid’ menjadi alasan pembenaran dan paling rasional mengenai langkah pragmatis kebijakan nuklir. Iran, menurut Ehteshami, memandang segala kebijakan AS hanyalah untuk menghina posisi Iran di Timur Tengah. Alasan utama yang diungkapkan dalam artikel itu adalah masalah ekonomi pasca Perang Dunia II. Dimana Iran menganggap AS sebagai saingan di wilayah yang harusnya jadi kekuasaan Iran. Pandangan ini dikatakan dibagai rata oleh para elit birokrat dan militer di negeri para Mullah itu, sehingga kebencian itu makin mendarah daging.

Sebaliknya, AS memikirkan segala tindakannya di Timur Tengah dengan segala pertimbangan matang. Mereka akan berpikir dua kali sebelum mengembangkan senjata apa pun di Timur Tengah karena berujung konfrontasi langsung dengan Iran. Ini karena AS punya asumsi kalau Iran kemungkinan besar akan bereaksi dengan menguatkan sisten senjata nuklirnya. Suatu hal yang akhirnya menyebabkan Iran menyerang AS secara frontal. Dan lagi-lagi, Iran yang dianggap belum mapan secara ekonomi, akan meminta batuan para sekutu. Dalam hal ini negara-negara yang juga bermusuhan dengan AS –Rusia, Cina, dan Korea Utara[71].

Solusi lain yang ditawarkan pihak AS adalah pemotongan penggunaan minyak dari Iran. Dengan kata lain, minyak dari Iran dibatasi pemakaiannya agar mereka merasakan kesulitan keuangan dari pemotongan tersebut. Memang di tangan Ahmadinejad pemasukan utama Iran berasal dari dua sumber, pinjaman luar negeri yang mencapai 8 triliun dolar dan minyak mentah yang menyumbang 54 triliun dolar. Menurut David M. Smick, pemotongan impor minyak dari Iran tidak akan punya pengaruh besar dalam konsumsi minyak dunia. Saat ini saja suplai minyak dunia mencapai 5,7 triliun barel per hari. Dua kali dari jumlah eskpor minyak Iran per harinya. Malah, tambah Smick, pemotongan penggunaan minyak Iran akan menguntungkan untuk pasar dunia dan membuat Ahmadinejad terbebani dengan kurangnya pemasukan. Tambahan lagi, pembangunan fasilitas minyak di Iran juga tidak terlalu baik mengingat kurangnya investasi di dalamnya. Akibatnya, tanpa pengurangan penggunaan pun minyak Iran sudah mengalami ancaman keambrokan infrastruktur[72].

Padahal dengan semua bukti, terlihat jelas kalau AS menerapkan kebijakan diskriminatif pada Iran. Bisa dibilang AS malah menunjukkan kebijakan dua mata pisau. Di satu sisi melarang perkembangan nuklir dengan alasan kemanusiaan dan membahayakan. Namun di sisi lain, AS malah mengembangkan program nuklir yang lebih canggih bahkan mendukung negara lain untuk melakukan hal yang sama meski negara itu tak punya hak secara sah dan legal.

Dari periode 1940 hingga 1950-an, AS tercatat tiga kali mengadakan tes nuklir besar-besaran[73]. Yang pertama terjadi di tahun 1946-1948 di kawasan Micronesia[74] yang diberi nama Operation

Cross Roads. Dilanjutkan pada periode 1951-1958, dimana lebih dari 100 atmosferic nuclera di tes di Nevada, Las Vegas. Dan terakhir pada periode 1954-1958 juga di Macronesia tepatnya di kepulauan Bikini. Tes terakhir yang disebut malah membuat ekosistem laut di sekitar lokasi mati karena salahnya perhitungan dampak lingkungan. Setelah tes, tak ada laporan tertulis berapa banyak makhluk hidup yang terkena efek radiasi nuklir itu.

AS sebagai negara yang meminta Iran untuk bersedia diinspeksi soal nuklirnya juga berani memalsukan laporan IAEA. Dalam sebuah surat bertanggal 23 Agustus 2006 yang dituliskan oleh seorang ajudan senior Kepala IAEA Mohammad El Baradei, dan dikirimkan kepada Ketua Panitia Pemilihan Intelejen menyatakan bahwa pemutarbalikan fakta yang cukup serius telah dibuat IAEA terkait dengan temuan dari aktivitas Iran. Surat tersebut mengklaim bahwa laporan tersebut telah keliru menunjukkan bahwa program nuklir Iran telah semakin berkembang dibandingkan dengan rangkaian laporan IAEA sebelumnya ditambah dengan perkiraan yang hampir pasti dari intelejen Amerika sendiri. Pada laporan yang salah tersebut digambarkan bahwa Iran memiliki pengayaan uranium pada suatu mesin untuk tingkatan memproduksi senjata pada April 2006 padahal pengawas IAEA telah membuat pernyataan yang sangat jelas bahwa pengayaan yang dilakukan oleh Iran hanyalah dalam tingkatan rendah yang digunakan untuk bahan bakar reaktor tenaga nuklir.

Pemutarbalikan fakta didapati sedikit banyak pada laporan tersebut bahwa IAEA berusaha untuk memindahkan penjiagaan terhadap pengawas senior yang menduga bahwa tujuan dari program Iran adalah untuk menciptakan senjata. Surat tersebut selanjutnya menambahkan bahwa laporan itu memuat suatu penghinaan dan temuan yang tidak jujur bahwa pengawas dicampakkan karena tidak mau terikat dengan adanya kebijakan IAEA tak terkecuali para pejabat yang mengutarakan seluruh kebenaran mengenai Iran. Lebih lanjut disebutkan bahwa pengawas tersebut sebenarnya merupakan peninggalan kepala bagian IAEA untuk Iran[75].

Sejak diajukan ke DK PBB tahun 2006, dibahas pada 23 Desember 2006, hingga menghasilkan Resolusi 1737. Inti masalah nuklir Iran adalah tidak adanya kepercayaan pada pengembangan teknologi nuklir Iran. Proses pengayaan uranium Iran ditengarai memperkuat kecurigaan itu. Iran dinilai tidak transparan. Resolusi 1747 meminta Iran transparan dan bekerja sama dengan Badan Tenaga Atom Internasional, menjadi pihak *Additional Protocol* IAEAs, dan menghentikan proses pengayaan uraniumnya.

Laporan Dirjen IAEA tanggal 22 Februari 2008 berbeda dengan laporan tahun 2006 dan 2007, basis lahirnya resolusi 1737 dan 1747 yang memberi sanksi kepada Iran. Laporan Dirjen IAEA kali ini menggarisbawahi adanya kerja sama dan transparansi yang diberikan Iran, termasuk kesepakatan tentang enam butir rencana kerja yang harus dipenuhi Iran[76].

Bisa terlihat juga di sini bagaimana PBB bisa dikendalikan oleh AS. Padahal pendirian utama Persatuan Bangsa-bangsa itu adalah untuk mencapai perdamaian di antara negara tanpa adanya rasa superior. Persetujuan AS, sekutu, dan beberapa negara pengikutnya sudah menyalahi salah satu ketentuan dasar PBB, yaitu hak untuk menentukan nasib sendiri.

Menurut buku panduan dasar PBB, Majelis Umum sudah menegaskan kembali absahnya perjuangan bangsa-bangsa untuk kemerdekaan, kesatuan wilayah, kesatuan nasional dan kebebasan dari dominasi kolonialisme dan penjajah serta bebas dari pendudukan dengan jalan apa pun, termasuk perjuangan bersenjata[77].

Namun PBB sebagai wadah negara-negara di dunia tak bisa melakukan apa pun menyoal dukungan ini serta perkembangan nuklir AS. Pasalnya tak ada negara lain di dunia ini yang memiliki pengaruh paling besar ke PBB selain AS. Hal ini mulai terasa di tahun 1990-an, dimana saat itu AS sering menggunakan pengaruhnya di PBB untuk menghindari segala bentuk pelanggaran kemanusiaan[78]. Contoh paling nyata pada pemerintahan George W. Bush adalah intervensi ke Irak dan diskriminasi pada Iran.

AS yang memiliki kepentingan sebagai negara adidaya melihat Iran sebagai ancaman. Kemampuan Iran saat ini memang masih sebatas pembangkit tenaga listrik. Namun dengan sumber daya alam dan manusia yang melimpah, tentunya hanya soal waktu ketika Iran akhirnya bisa menyamai teknologi nuklir AS.

Ketakutan ini bisa terbaca dari sekian langkah serius yang dilakukan AS untuk penghentian nuklir Iran. Dan hal ini makin terlihat jelas di tangan mantan Presiden George W. Bush. Dalam pemerintahannya, Bush dengan keras melarang Iran untuk mengembangkan sumber daya nuklirnya. Saat itu, Bush memberi pembelaan kalau hal tersebut bisa membahayakan dunia pada umumnya, dan umat manusia pada khususnya.

Padahal dalam laporan IAEA – yang dipaksa AS untuk menginspeksi Iran- tercatat tak ada ancaman apa pun dalam perkembangan nuklir Ira. Bukan itu saja, salah satu penyelidik senior PBB yang sudah lama bertugas di Irak, Scott Ritter, menyatakan sebuah kritik pedas pada AS. Ritter yang mengabdikan pada PBB era 1991-1998, mengatakan kalau jumlah gas hexafluoride yang dimiliki Iran tidaklah cukup untuk dalam pembuatan senjata nuklir. Ia juga menekankan kalau Iran tidak mampu dan tak punya keinginan untuk menggunakan sumber dayanya itu sebagai senjata mematikan. Karena itu, Ritter sampai pada kesimpulan kalau Iran tidaklah berbahaya dan bukan ancaman untuk negara manapun[79].

Ahmadinejad sebagai pihak yang dipojokkan mencoba menepis tuduhan ini dengan sengaja mengundang para perwakilan negara-negara untuk melihat langsung pabrik nuklirnya. Tujuannya tentu saja menyajikan kesalahan pandang kalau Iran berbahaya. Namun tawaran yang ia sampaikan dalam sebuah pidato di November 2005, ditolak menta-mentah. Tanpa alasan yang jelas, AS dan sekutunya menolak ajakan itu dan tetap mengkonfrontir Iran di meja PBB.

Namun, tidak seperti AS yang mengancam Iran dengan cara-cara represif, Eropa terlihat lebih kalem. Mereka bahkan mencetuskan usaha perdamaian demi tercapainya konsensus atas masalah nuklir ini. Sebagai contoh terlihat dari tawaran damai nuklir yang isinya sengaja menggunakan pilihan bahasa yang sangat berhati-hati. Kalimat seperti ‘penghentian permanen’ sengaja mereka ganti dengan ‘penghentian sementara’ namun dengan jangka waktu yang relatif panjang. Selain untuk mencegah rasa tersinggung dari para politikus Iran, Eropa juga melihat cara keras dari AS malah tidak berbuah

sama sekali. Memang, hal ini juga tidak menghasilkan perundingan damai dengan Iran. Tapi setidaknya ada inisiatif konsesus dari sekutu Barat untuk mencapai konsesus yang diinginkan.

